



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)**

**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersusun dengan baik .

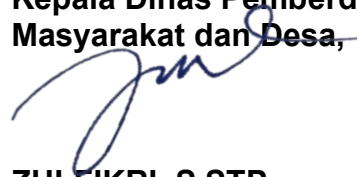
Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, .Organisasi perangkat daerah diharapkan untuk meyampaikan LPPD Organisaais Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa LPPD DISPMD Tahun 2025 ini masih belum sempurna. Oleh Karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LPPD DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

**Benteng, 20 Februari 2026**

**Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa,**



**ZULFIKRI, S.STP**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP. 19790818 199711 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD .....	5
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	7
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b> .....	<b>9</b>
2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome .....	11
2.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	15
2.3. Capaian Indikator Komponen Otonomi Daerah .....	28
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>22</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun dan Indeks Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 - 2025.....	5
Tabel 1.2	Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 .....	7
Tabel 1.3	Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur dan Jenis Jabatan Tahun 2025.....	8
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	8
Tabel. 2.1.	Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025.....	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluara (Output) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.....	13
Tabel 2.3	Perbandingan Data Capaian Statusl Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 – 2025.....	20
Tabel 2.4	Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2025.....	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	21

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) memuat satu kesatuan hasil Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Leding Sektor Program/Kegiatan Pemberdayaan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Kunci Outcome.

## **1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Gambar 1**  
**Foto Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng

Titik Koordinat : -6,121287°, 120,466487°

e-mail : [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat

dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai berdasarkan sasaran Meningkatnya Tingkat Kemajuan Desa dengan indikator sebagai berikut Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Angka), Nilai Dimensi Ekonomi (Angka) dan Nilai Sosial (Angka) yang diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, Meningkatnya Meningkatnya Status Desa dengan Indikator Indeks Desa.

Indeks Desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi 6 (enam) dimensi meliputi : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan. Dalam penyusunan ID 6 (enam) Dimensi dibentuk dari 13 Sub Dimensi dan 48 Indikator antara lain : 1) Aspek dimensi layanan dasar terdiri dari sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, sub dimensi utilitas, dasar dan 13 (tiga belas) indikator, 2) Aspek dimensi sosial terdiri dari sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 (dua belas) indikator, 3) Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi pendukung ekonomi dengan 12 indikator, 4) Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 (lima) indikator, 5) Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 (lima) indikator, 6) Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 (lima) indikator.

Perhitungan Indeks Dimensi dapat diketahui dari 48 Indikator yang digunakan dalam penentuan kemajuan dan kemandirian desa mempunyai nilai dan ukuran yang berbeda-beda, diantaranya adalah, persentase, km, rupiah, dan tahun. Terkait dengan nilai indikator yang berbeda, maka nilai-nilai indikator tersebut dapat digabung (dijumlahkan atau dikurangkan). Agar nilai tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan maka perlu dilakukan standarisasi nilai indikator. Indeks Desa merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total dari ke 6 (enam) dimensi.

Perhitungan Skor Indikator dapat diketahui dengan melihat setiap dimensi dibangun dari serangkaian sub dimensi dan setiap sub dimensi yang diturunkan kedalam perangkat indikator. Sebelum melakukan perhitungan Dimensi dan Indeks Desa, dilakukan scoring pada setiap indikator. Setiap indikator mempunyai skor yang sudah seragam, yaitu 1-5.

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa bahwa klasifikasi Indeks Desa mengacu pada Indeks Desa Membangun, yang terdiri dari 5 (lima) klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa antara lain : (i) Desa Sangat Tertinggal merupakan desa yang mempunyai ketersediaan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi , lingkungan, aksebilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Secara teknis Desa sangat tertinggal merupakan Desa dengan nilai indeks  $0\% \leq ID \leq 49,48\%$ ; (ii) Desa Tertinggal merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksebilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas dengan nilai indeks  $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$  (iii) Desa Berkembang merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksebilitas dan administrasi yang cukup baik dengan nilai indeks  $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$  (iv) Desa Maju merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksebilitas, dan administrasi pemerintahan yang sudah baik dengan nilai indeks  $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$  (v) Desa Mandiri merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksebilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik dengan nilai indeks  $79,63\% \leq ID \leq 100\%$ .

**Tabel 1.2**

**Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun dan Indeks Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2025**

No	Status Desa Berdasarkan IDM/ID	TAHUN	
		2024 (IDM)	2025 (ID)
1	Desa Mandiri	22	28
2	Desa Maju	17	19
3	Desa Berkembang	36	31
4	Desa Tertinggal	6	3
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0
Jumlah		81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2025

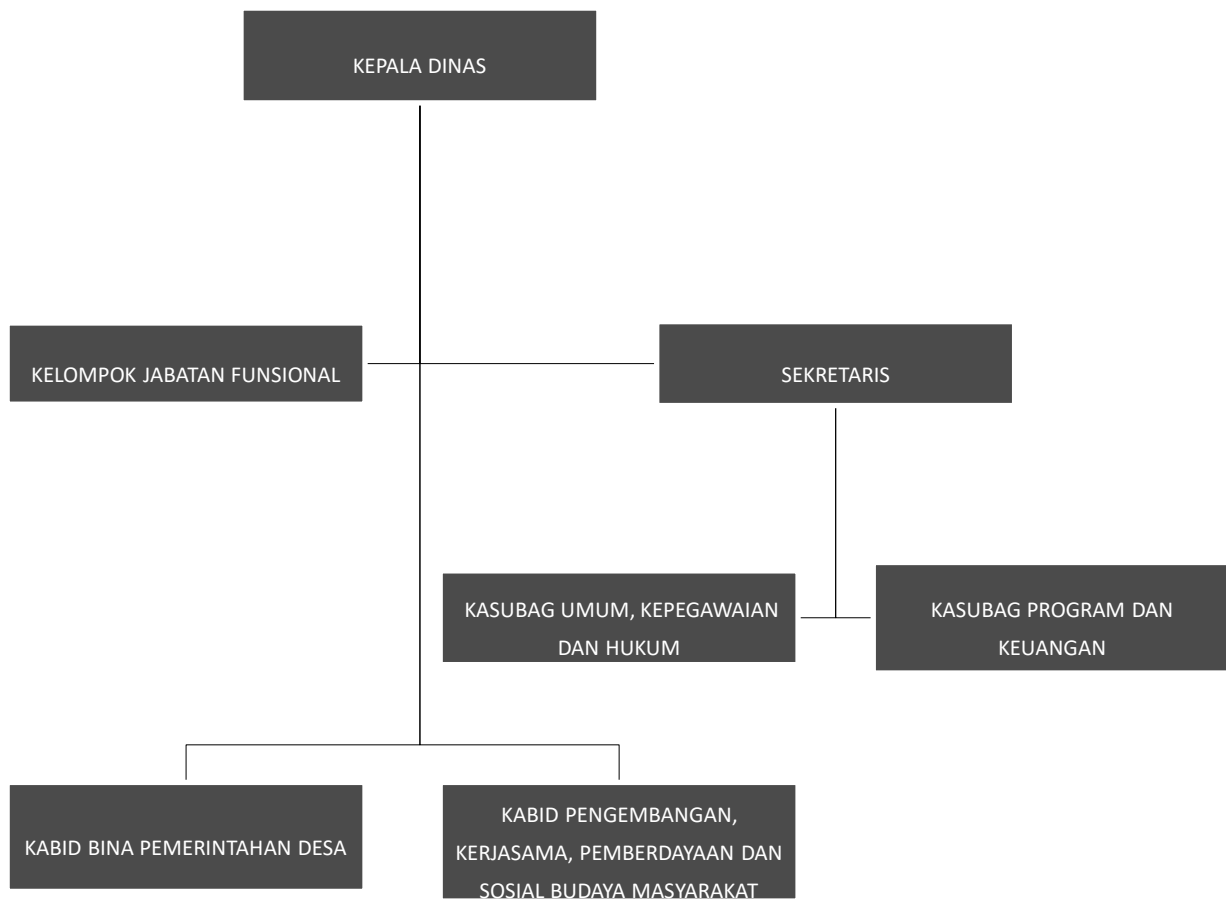
### **1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD;**

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan di bidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

## Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025



*Berdasarkan Lampiran Perbup. Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DISPMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan guna penanggulangan masalah pelayanan di bidang pemerintahan desa/kelurahan dalam bentuk pelayanan *public*.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### 1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini .

**Tabel 1.3**  
**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

NO	PENDIDIKAN							PPPK PW	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	IX		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	1	1	-	4	-	11	14
4	D III	-	-	2	-	-	-	1	3
5	S1	-	-	10		-	4	11	21
6	S2	-	-	1	1	-	-	-	2
	JUMLAH		1	14	1	4	4	23	40

**Tabel 1.4**  
**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur dan Jenis Jabatan Tahun 2025**

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	5
8.	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	6
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2
10.	Pengelola Data dan Informasi	Pelaksana	2
11.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	4
<b>Jumlah</b>			<b>25</b>

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anggaran pokok tahun 2025 yang tersedia sebesar Rp. 4.194.437.500,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.4.**  
**Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	4.178.725.600,00	3.992.806.956,00	95,55
1.1	Belanja Pegawai	2.105.558.700,00	1.945.541.751,00	92,40
1.2	Belanja Barang dan jasa	1.588.166.900,00	1.562.265.205,00	98,37
1.3	Belanja Hibah	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal	<b>15.711.900,00</b>	<b>14.741.500,00</b>	93,82
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	15.711.900,00	14.741.500,00	93,82
<b>Jumlah</b>		<b>4.194.437.500,00</b>	<b>4.007.548.456,00</b>	<b>95,54</b>

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 4.194.437.500,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.105.558.700,00 (Dua Milyar Seratus Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.588.166.900,00,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Sembilan Ratus Rupiah) dan Belanja Hibah sebesar Rp. 485.000.000,00,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. (Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah).

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam table berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun Anggaran 2025**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.006.950.900</b>	<b>2.828.578.117</b>	<b>94,07</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>21.992.323</b>	<b>87,96</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	10.000.000	8.875.841	88,76
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.144.124	85,76
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.205.501	88,22
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.116.923	84,68
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	2.201.735	88,07
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.200.850	88,03
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.247.349	89,89
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.108.200.000</b>	<b>1.947.907.883</b>	<b>92,96</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.105.558.700	1.945.541.751	92,40
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.641.300	2.366.132	89,58
3.	Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>360.615.000</b>	<b>354.037.424</b>	<b>98,17</b>
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.321.600	32.422.974	91,98
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.449.500	4.090.792	75,07
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	8.790.000	7.477.060	85,06
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.350.000	4.000.000	91,95
5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.250.000	20.232.000	99,91
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.523.900	285.814.598	99,75
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.570.100</b>	<b>13.726.401</b>	<b>94,21</b>
1.	Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	14.570.000	13.726.401	94,,21
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>217.555.800</b>	<b>213.763.772</b>	<b>98,25</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	66.308.000	62.958.364	94,95
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.247.800	150.808.408	99,71
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>281.010.100</b>	<b>277.150.314</b>	<b>98,62</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.630.000	44.625.000	99,00
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.090.000	66,545.497	94,94
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.560.000	10.249.817	97,06
4.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.730.000	155,730.000	100
II.	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.163.387</b>	<b>98,85</b>
	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.163.387</b>	<b>98,85</b>
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	3.200.000	3.163.387	98,85
III.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0	0	0
IV.	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>283.185.200</b>	<b>275.061.966</b>	<b>97,13</b>
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>283.185.200</b>	<b>275.061.966</b>	<b>97,13</b>
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	83.025.000	81.965.420	98,72
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	57.070.000	56.251.974	98,57
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	65.000.000	63.813.173	98,17
4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	46.490.200	42.082.108	90,52
5.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	28.400.000	27.809.902	97,92

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
6.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	3.200.000	3.139.389	98,11
V.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>901.101.400</b>	<b>900.724.986</b>	<b>99,95</b>
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>901.101.400</b>	<b>900.724.986</b>	<b>99,95</b>
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8.851.400	8.661.599	98,08
2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7.250.000	7.063.387	97,43
3.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0	0	0
4.	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	885.000.000	885.000.000	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.194.437.500</b>	<b>4.007.548.456</b>	<b>95,54</b>

## 2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome

Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome yaitu persentase pengentasan desa tertinggal dan Persentase peningkatan status desa Maju. Berdasarkan Indeks Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 , persentase pengentasan desa tertinggal sebesar 50% atau sebanyak 3 (tiga) Desa, dimana pada tahun 2024 Desa yang berstatus Desa Tertinggal sebanyak 6 (Enam) Desa dan di tahun 2024 tersisa 3 (tiga) Desa. Untuk IKK outcome persentase Peningkatan Status Desa Mandiri sebesar 40,90 %, di Tahun 2025 Desa yang meningkat statusnya dari desa berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri sebanyak 9 Desa , dimana sampai pada tahun 2024 sesuai IDM, desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri sebanyak 22 Desa , sedangkan pada Tahun 2025 berdasarkan Indeks Desa status Desa Mandiri meningkat menjadi 28 Desa.

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Data Capaian Status Desa berdasarkan Indeks Desa**  
**Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar**  
**Tahun 2024-2025**

No	Status Desa Berdasarkan IDM/ID	2024	%	2025	%
1	Desa Mandiri	22	27,17	28	34,57
2	Desa Maju	17	20,99	19	23,46
3	Desa Berkembang	37	44,44	31	38,27
4	Desa Tertinggal	6	7,41	3	3,7
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	<b>81</b>	<b>100,00</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir perkembangan status desa cukup signifikan, hal ini dibuktikan bahwa sejak Tahun 2023 sudah tidak terdapat desa yang berstatus Desa Sangat Tertinggal dan Jumlah Desa yang berstatus Tertinggal Tahun 2025 tersisa 3 Desa demikian juga untuk status desa Berkembang, dari 37 desa menjadi 31 desa, ada beberapa desa yang meningkat statusnya dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Untuk status Desa Mandiri pada Tahun 2024 sebanyak 22 Desa dan di Tahun 2024 meningkat menjadi 28 Desa. Berdasarkan data Indeks Desa (ID) desa yang berstatus Desa Maju meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri sebanyak 6 (enam) desa yaitu : Desa Kaburu, Desa Balang Butung, Desa Buki, Desa Kohala, Desa Lalang Bata dan Status Desa Maju yang meningkat statusnya menjadi Desa Berkembang menjadi Desa Maju di Tahun 2025

**Tabel 2.3**  
**Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa**  
**Membangun/Indeks Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar**  
**Tahun 2024-2025**

NO.	STATUS DESA	Data 2024	Data 2025	Status Tetap (sama dengan tahun 2024)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2024)	% Peningkatan (capaian)	% Pengentasan (Capaian)
1	Mandiri	22	28	18	6	34,57	22,22 %
2	Maju	17	19	10	8	23,46	
3	Berkembang	36	31	28	3	38,27	
4	Tertinggal	6	3	3	0	3,7	50%
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0,00	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>56</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>72,22%</b>

Tabel 2.4

## Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
		2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	3/6 x 100%	50 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang sebanyak 3 Desa dan jumlah Desa Tertinggal di di awal Tahun 2025 sebanyak 6 Desa
		2.g.2	Persentase peningkatan status desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa Maju dan Mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun ----- x 100% Jumlah desa Berkembang (per-awal tahun n)	8/36 x 100%	22,22 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Berkembang yang memenuhi kriteria Desa Maju dan Mandiri sebanyak 8 Desa dan jumlah Desa Berkembang di awal Tahun 2025 sebanyak 36

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
								Desa
		2.g.3	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa	$\frac{\text{Jumlah kerjasama desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah kerja sama desa yang ditangani}} \times 100\%$	2 / 2 x 100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 50 %, Dimana Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang sebanyak 3 (tiga) Desa dari total desa tertinggal sebanyak 6 (enam) desa Sedangkan Persentase peningkatan status desa Mandiri sebesar 22,22%, dimana Tahun 2025 jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria Desa Maju dan Mandiri sebanyak 8 Desa jumlah desa. Tahun 2025 Persentase Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa sebesar 100 % dimana jumlah kerjasama yang sudah ditetapkan dan masih berlaku sebanyak 2 (dua) kerjasama sedangkan kerjasama yang ditangani sebanyak 2 (dua) kerjasama.

## **2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penunjang urusan pemerintahan telah dilaksanakan dan mendukung urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sebesar RP. **4.194.437.500,-** dan realisasi sebesar Rp. **4.007.548.456,-** atau 95,54 % sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 21.992.323,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 87,96 %, dengan uraian sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.875.841,- (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 88,76 % dengan output tersusunnya Dokumen Renja Pokok dan Renja Perubahan dan Renstra Tahun 2025-2029
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.144.124,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 85,76%, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.205.501,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) atau sebesar 88,22%, dengan output Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.116.923,- (Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 84,68%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.201.735,- (Dua Juta Dua Ratus Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 88,07 %, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.200.850,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 88,03 %, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.247.349,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 89,89%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.108.200.00,- (Dua Milyar Seratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.947.907.883- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enpat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Delapan

Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 92,96 %, dengan uraian sub kegiatan :

- a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 2.105.558.700,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.945.541.751,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 92,40% dengan output Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.641.300,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 2.366.132,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah ) atau sebesar 89,58 %, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.360.615.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 354.037.424,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 91,98 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 35.321.600,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 32.422.974,- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 91,98%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.
  - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 5.449.500,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 4.090.792,- (Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 75,07 %, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.790.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.477.060,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 85,06%, dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah atau sebesar Rp. 91,95).
  - e. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 20.250.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 20.232.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 99,91%, dengan output terlaksananya fasilitas setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
  - f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 286.523.900,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 285.814.598,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 99,75%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp14,750.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 13.726.401- (Tiga rincian sub kegiatan :
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 15.711.900,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 14.741.500,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 94,21 %, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 2 unit printer dan 1 Unit Scanner yang akan menunjang kelancaran administrasi.
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.217.555.800,- (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima

Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 213.763.772,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 98,25 %, dengan rincian sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 66.308.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. 62.958.364,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 94,95%, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 151.247.800- (Seratus Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 150.808.408,- (Seratus Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) atau 99,71 %, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 281.010.100,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Seratus Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.277.150.314,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) atau 98,62 %, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 44.630.000,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 44.625.000,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 99,00%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 70.090.000- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 66.545.497,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Raus Sembilan Puluh

Tujuh Rupiah) atau 94,94%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 10.560.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.249.817,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau 97,06% . Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 155.730.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 155.730.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau 99,88%. Adapun Output terpeliharanya Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor yang ada.

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. **Untuk Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak melaksanakan tugas pembantuan.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 merupakan laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) yang telah ditetapkan Kemendagri, secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

- Persentase Pengentasan Desa Tertinggal sebesar 50 %,
- Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri sebesar 22,22 %
- Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa sebesar 100 %

#### **B. Saran**

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program dan Kegiatan Tahun 2025, tentunya masih perlu ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 mendatang dapat dicapai dan dilaksanakan. Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 akan dilakukan evaluasi untuk dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun anggaran, Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan besar harapan kami semoga dapat menjadi referensi utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025 yang masih berupa rekomendasi bagi daerah untuk meningkatkan

kapasitas guna mewujudkan peningkatan daya saing, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta penentuan status (peringkat) kinerja daerah secara Nasional didalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan untuk memantapkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

**Benteng, 20 Februari 2026**  
**KEPALA DINAS,**



**ZULFIKRI.STP**  
**Pangkat : Pembina TK.I**  
**NIP. 1979081819971110**





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

**JUMLAH DESA TERTINGGAL YANG MEMENUHI KRITERIA DESA BERKEMBANG PER  
TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA PER TAHUN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Desa	Desa Tertinggal Tahun 2025		Desa Berkembang Tahun 2025		Ket
			Nilai/Skoring IDM	Status Desa	Nilai/Skoring ID	Status Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Takabonerate	Tarupa	0,5139	Tertinggal	68,03	Berkembang	
2.	Pasilambena	Garaupa Raya	0,5895	Tertinggal	67,87	Berkembang	
3.	Pasilambena	Karumpa	0,5971	Tertinggal	58,27	Berkembang	
<b>Jumlah</b>		3					

Benteng, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS,

ZULFIKRI, S.STP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19800818 199711 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

**JUMLAH DESA TERTINGGAL (PER-AWAL TAHUN 2025)**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Desa	Nilai/Skor ID	Status Desa	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pasimarannu	Komba-komba	0,5392	Tertinggal	
2.	Takanonerate	Latondu	0,5465	Tertinggal	
3.	Takabonerate	Tarupa	0,5392	Tertinggal	
4.	Pasilambena	Karumpa	0,4919	Tertinggal	
5.	Pasilambena	Garaupa Raya	0,5859	Tertinggal	
6.	Pasilambena	Pulo Madu	0,4919	Tertinggal	

Benteng, 20 Februari 2026  
KEPALA DINAS,

  
ZULFIKRI, S.STP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19800818 199711 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

**JUMLAH DESA BERKEMBANG YANG MEMENUHI KRITERIA DESA MAJU DAN  
MANDIRI PER TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA PER TAHUN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Desa	Desa Berkembang Tahun 2025		Desa Mandiri /Maju Tahun 2025		Ket
			Nilai/Skoring ID	Status Desa	Nilai/Skoring ID	Status Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bontoharu	Kalepadang	0,6867	Berkembang	70,39	Maju	
2.	Bontomanai	Bonea Makmur	0,6365	Berkembang	69,44	Maju	
3.	Bontosikuyu	Lantibongan	0,6564	Berkembang	77,17	Maju	
4.	Pasimasunggu	Labuang Pamajang	0,6921	Berkembang	74,64	Maju	
5.	Pasumasunggu Timur	Bontobaru	0,6495	Berkembang	74,17	Maju	
6.	Pasumasunggu Timur	Bontobulaeng	0,6117	Berkembang	77,64	Maju	
7.	Pasimasunggu Timur	Bontojati	0,6641	Berkembang	73,39	Maju	
8.	Takabonerate	Jinato	0,6416	Berkembang	69,92	Maju	
<b>Jumlah</b>		8					

Benteng, 20 Februari 2026  
KEPALA DINAS,

ZULFIKRI S.STP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19800818 199711 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

**JUMLAH DESA BERKEMBANG PER AWAL TAHUN 2025**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Desa	Nilai/Skor ID	Status Desa	Ket
1.	Bontoharu	Bontoborusu	0,6879	Berkembang	
2.		Bontolebang	0,6243	Berkembang	
3.		Kahu-kahu	0,6140	Berkembang	
4.		Kalepadang	0,6867	Berkembang	
5.	Bontomanai	Bontokoraang	0,6367	Berkembang	
6.		Jambuiya	0,6375	Berkembang	
7.	Bontosikuyu	Lantibongan	0,6546	Berkembang	
8.		Polassi	0,6137	Berkembang	
9.		Tambolongan	0,6663	Berkembang	
10.	Pasilambena	Garaupa	0,6198	Berkembang	
11.		Kalaotoa	0,6437	Berkembang	
12.		Lembangmatene	0,5971	Berkembang	
13.		Garaupa Raya	0,5895	Berkembang	
14.		Karumpa	0,5971	Berkembang	
15.	Pasimarannu	Batu Bingkung	0,605	Berkembang	
16.		Bonea	0,6233	Berkembang	
17.		Lamantu	0,6449	Berkembang	
18.		Lambego	0,6725	Berkembang	
19.		Sambali	0,6160	Berkembang	
20.	Pasimasunggu	Bontosaille	0,6644	Berkembang	
21.		Ma'minasa	0,6921	Berkembang	
22.		Massungke	0,6830	Berkembang	
23.		Tanamalala	0,6666	Berkembang	
24.		Teluk Kampe	0,6098	Berkembang	
25.	Pasimasunggu Timur	Bontobaru	0,6495	Berkembang	
26.		Bontobulaeng	0,6117	Berkembang	
27.		Bontojati	0,6641	Berkembang	
28.		Bontomalling	0,6456	Berekembang	
29.		Lembang Baji	0,6214	Berekembang	
30.	Takabonerate	Batang	0,6865	Berkembang	
31.		Jinato	0,6416	Berkembang	

32		Kayuadi	0,6035	Berkembang	
33		Khusus Pasitallu	0,6003	Berkembang	
34		Nyiur Indah	0,6171	Berkembang	
35		Rajuni	0,6159	Berkembang	
36		Tambuna	0,6213	Berkembang	

Benteng, 20 Februari 2026  
KEPALA DINAS,

  
ZULFIKRI S.STP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19800818 199711 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

**JUMLAH KERJA SAMA DESA YANG TELAH DITETAPKAN DAN BERLAKU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2025**

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Ruang Lingkup Kerja sama Desa		Bidang Kerja Sama Desa yang telah ditetapkan tahun 2025 dan masih berlaku	Surat Keputusan Kerja Sama yang telah ditetapkan	Ket
				Kerja sama antar Desa	Kerja sama dengan pihak ketiga			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kepulauan Selayar	Buki	Buki	1. Desa Lalang Bata 2. Desa Balang Butung 3. Desa Kohala 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bersama: No. 04 Tahun 2023, Tanggal 21 November 2023	
2.			Lalang Bata	1. Desa Buki 2. Desa Balang Butung 3. Desa Kohala 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur			Peraturan Bersama: No. 04 Tahun 2023, Tanggal 21 November 2023	
3.			Balang Butung	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Kohala 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur			Peraturan Bersama : No. 4 Tahun 2025, Tanggal	
4.			Kohala	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Balang Butung 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur			Peraturan Bersama No. 05 Tahun 2025, Tanggal 21 November 2023	

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Ruang Lingkup Kerja sama Desa		Bidang Kerja Sama Desa yang telah ditetapkan tahun 2025 dan masih berlaku	Surat Keputusan Kerja Sama yang telah ditetapkan	Ket
				Kerja sama antar Desa	Kerja sama dengan pihak ketiga			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.			Bontolempangan	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Balang Butung 4. Desa Kohala 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bersama : No. 05 Tahun 2023, Tanggal 21 November 2023	
			Mekar Indah	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Balang Butung 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Kohala 6. Desa Buki Timur			Peraturan Bersama : No. 04 Tahun 2023, Tanggal 21 November 2023	
			Buki Timur	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Balang Butung 4. Desa Kohala 5. Desa Bontolempangan 6. Desa Mekar Indah			Peraturan Bersama : No. 05 Tahun 2023, Tanggal 21 November 2023	
		Pasimarannu	Bonerate	1. Desa Majapahit 2. Desa Lamantu 3. Desa Batu Bingkung 4. Desa Bonea 5. Desa Sambali 6. Lambego 7. Komba-komba		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bersama No.05 Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024	
			Majapahit	1. Desa Bonerate 2. Desa Lamantu 3. Desa Batu Bingkung 4. Desa Bonea 5. Desa Sambali 6. Desa Lambego 7. Komba-komba			Peraturan Bersama No.07 Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024	
			Lamantu	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Batu Bingkung 4. Desa Bonea 5. Desa Sambali 6. Desa Lambego 7. Desa Komba-komba			Peraturan Bersama No.03 Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024	

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Ruang Lingkup Kerja sama Desa		Bidang Kerja Sama Desa yang telah ditetapkan tahun 2025 dan masih berlaku	Surat Keputusan Kerja Sama yang telah ditetapkan	Ket
				Kerja sama antar Desa	Kerja sama dengan pihak ketiga			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kepulauan Selayar	Pasimarannu	Batu Bingkung	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Lamantu 4. Desa Bonea 5. Desa Sambali 6. Desa Lambego 7. Desa Komba- komba		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bersama No.28 Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024	
			Bonea	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Lamantu 4. Desa Batu Bingkung 5. Desa Sambali 6. Desa Lambego 7. Desa Komba- komba			Peraturan Bersama No.02 Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024	
			Sambali	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Lamantu 4. Desa Batu Bingkung 5. Desa Bonea 6. Desa Lambego 7. Desa Komba- komba			Peraturan Bersama No.04 Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024	
			Lambego	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Lamantu 4. Desa Batu Bingkung 5. Desa Bonea 6. Desa Sambali 7. Desa Komba- komba			Peraturan Bersama No.04 Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024	
			Komba- komba	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Lamantu 4. Desa Batu Bingkung 5. Desa Bonea 6. Desa Sambali 7. Desa Komba- komba			Peraturan Bersama No.04 Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024	

Benteng, 20 Februari 2026

**KEPALA DINAS,**



**ZULFIKRI, S.STP**

Pangkat: Pembina TK. I

NIP. 19790818 199711 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

**JUMLAH KERJA SAMA DESA YANG DITANGANI**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2025**

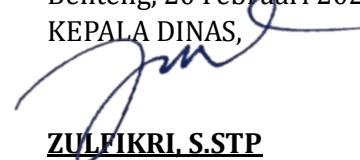
No	Kecamatan	Desa	Ruang Lingkup Kerjasama Desa		Bidang Kerja Sama Desa	Status Kerjasama Desa	
			Kerja sama antar Desa	Kerja sama dengan pihak ketiga		Sudah ditangani	Belum ditetapkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Buki	Buki	1. Desa Lalang Bata 2. Desa Balang Butung 3. Desa Kohala 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sudah ditangani	
2		Lalang Bata	1. Desa Buki 2. Desa Kohala 3. Desa Balang Butung 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur				
3		Kohala	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Balang Butung 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur				
4		Balang Butung	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Kohala 4. Desa Bontolempangan 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur				
5		Bontolempangan	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Kohala 4. Desa Balang Butung 5. Desa Bontolempangan 6. Desa Buki Timur				

No	Kecamatan	Desa	Ruang Lingkup Kerjasama Desa		Bidang Kerja Sama Desa	Status Kerjasama Desa	
			Kerja sama antar Desa	Kerja sama dengan pihak ketiga		Sudah ditangani	Belum ditetapkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6		Mekar Indah	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Kohala 4. Desa Balang Butung 5. Desa Mekar Indah 6. Desa Buki Timur				
7		Buki Timur	1. Desa Buki 2. Desa Lalang Bata 3. Desa Kohala 4. Desa Balang Butung 5. Desa Bontolempangan 6. Mekar Indah				
	Pasimarannu	Bonerate	1. Desa Majapahit 2. Desa Lamantu 3. Desa Batu Bungkung 4. Desa Bonea 5. Desa Sambali 6. Desa Lambego 7. Desa Kombakomba		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sudah ditangani	
		Majapahit	1. Desa Bonerate 2. Desa Lamantu 3. Desa Batu Bungkung 4. Desa Bonea 5. Desa Sambali 6. Desa Lambego 7. Desa Kombakomba				
		Lamantu	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Batu Bungkung 4. Desa Bonea 5. Desa Sambali 6. Desa Lambego 7. Desa Kombakomba				
		Batu Bungkung	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Lamantu 4. Desa Bonea 5. Desa Sambali 6. Desa Lambego 7. Desa Kombakomba				
		Bonea	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Lamantu 4. Desa Batu Bungkung				

No	Kecamatan	Desa	Ruang Lingkup Kerjasama Desa		Bidang Kerja Sama Desa	Status Kerjasama Desa	
			Kerja sama antar Desa	Kerja sama dengan pihak ketiga		Sudah ditangani	Belum ditetapkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5. Desa Lamantu 6. Desa Sambali 7. Desa Komba-komba				
		Sambali	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Batu Bingkung 4. Desa Lamantu 5. Desa Sambali 6. Desa Bonea 7. Desa Komba-komba				
		Komba-komba	1. Desa Bonerate 2. Desa Majapahit 3. Desa Batu Bingkung 4. Desa Lamantu 5. Desa Sambali 6. Desa Bonea 7. Desa Lambego				

Benteng, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS,



**ZULFIKRI S.STP**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19800818 199711 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

**REKAPITULASI STATUS DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025**

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKASEBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SKOR	STATUS INDEKS DESA 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(5+6+7+8+9+10)/635$	12
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOHARU	730122003	BONTOSUNGGU	138	75	123	82	47	71	84,41	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOHARU	730122004	BONTOBORUSU	124	44	78	34	44	66	61,42	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOHARU	730122005	BONTOLEBANG	111	54	95	68	44	58	67,72	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOHARU	730122006	BONTOTANGNGA	149	73	112	64	49	70	81,42	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOHARU	730122007	KAHU-KAHU	107	62	68	56	46	54	61,89	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOHARU	730122008	KALEPADANG	118	51	115	63	47	53	70,39	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	7301032003	PAMATATA	140	77	132	66	49	74	84,72	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	7301032004	TANETE	157	71	110	76	42	76	83,78	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	7301032005	BUNGAIYA	135	75	139	46	48	65	80,00	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	7301032006	KAYU BAUK	128	54	111	54	43	60	70,87	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	7301032007	BARAT LAMBONGAN	153	53	90	68	49	57	74,02	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	7301032008	BONTONASALUK	154	59	147	54	48	76	84,72	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	7301032009	ONTO	155	75	142	58	40	56	82,83	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	73010320010	MAHARAYYA	151	72	125	56	47	64	81,10	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	73010320011	MENARA INDAH	146	60	114	42	34	45	69,45	MAJU

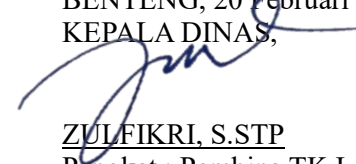
KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKASEBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SKOR	STATUS INDEKS DESA 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(5+6+7+8+9+10)/635$	12
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	73010320015	TAMALANREA	145	70	132	62	48	65	82,20	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042001	PARAK	161	77	130	83	49	63	88,66	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042002	BARUGAIYA	150	54	112	78	49	78	82,05	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042003	JAMBUIYA	133	62	83	48	29	59	65,20	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042004	MARE-MARE	142	81	122	70	45	67	82,99	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042005	POLEBUNGING	149	62	129	58	40	62	78,74	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042006	BONEA MAKMUR	139	62	88	50	30	72	69,45	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042008	BONTOMARANNU	162	81	136	78	49	74	91,34	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042010	BONEA TIMUR	125	68	122	62	44	68	77,01	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042011	BONTOKORAANG	103	47	73	54	48	61	60,79	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMANAI	7301042012	KABURU	148	75	116	79	40	71	83,31	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052001	HARAPAN	136	75	138	80	50	65	85,67	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052002	PATIKARYA	148	58	132	74	45	66	82,36	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052003	PATILERENG	142	78	121	66	47	63	81,42	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052004	LAIYOLO BARU	125	50	98	60	47	67	70,39	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052005	LAIYOLO	116	53	100	60	46	75	70,87	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052006	LANTIBONGAN	152	71	102	52	46	67	77,17	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052007	BINANGA SOMBAIYA	125	85	138	61	48	54	80,47	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052008	LOWA	148	75	129	70	38	80	85,04	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052009	APPATANAH	132	73	110	62	41	69	76,69	MAJU

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKASEBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SKOR	STATUS INDEKS DESA 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(5+6+7+8+9+10)/635$	12
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052010	TAMBOLONGAN	99	66	84	38	39	63	61,26	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052011	POLASSI	113	59	81	54	38	63	64,25	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	BONTOSIKUYU	7301052012	KHUSUS BAHULUANG	142	69	103	74	46	68	79,06	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU	7301062003	MA'MINASA	145	38	108	31	34	63	65,98	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU	7301062005	TANAMALALA	154	61	73	44	34	58	66,77	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU	7301062006	LABUAN PAMAJANG	150	51	114	42	43	74	74,65	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU	7301062007	MASSUNGKE	128	42	91	51	49	58	65,98	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU	7301062009	BONTOSAILE	144	55	96	34	31	50	64,57	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU	7301062011	TELUK KAMPE	121	67	121	50	29	48	68,66	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	7301072001	BONERATE	145	73	152	74	38	76	87,87	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	7301072002	MAJAPAHIT	124	57	107	56	35	64	69,76	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	7301072003	BATU BINGKUNG	107	55	69	58	41	67	62,52	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	7301072004	BONEA	115	67	74	58	41	50	63,78	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	7301072005	LAMBEGO	98	72	92	44	37	58	63,15	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	7301072006	KOMBA-KOMBA	96	31	73	48	23	55	51,34	TERTINGGAL
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	7301072007	SAMBALI	116	61	57	57	41	61	61,89	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	7301072008	LAMANTU	117	53	97	42	38	58	63,78	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082001	KAYUADI	127	57	79	47	36	52	62,68	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082002	BATANG	101	59	96	59	34	50	62,68	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082003	NYIUR INDAH	111	59	74	48	25	51	57,95	BERKEMBANG

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKASEBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SKOR	STATUS INDEKS DESA 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(5+6+7+8+9+10)/635$	12
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082004	TAMBUNA	94	59	96	46	32	64	61,57	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082005	JINATO	123	62	101	52	40	66	69,92	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082006	RAJUNI	94	60	110	50	46	66	67,09	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082007	LATONDU	84	33	71	44	44	61	53,07	TERTINGGAL
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082008	TARUPA	76	61	108	73	46	68	68,03	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	7301082009	KHUSUS PASITALLU	95	45	103	56	39	63	63,15	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASILAMBENA	7301092001	KALAO TOA	110	56	89	50	36	55	62,36	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASILAMBENA	7301092002	GARAUPA	142	45	73	49	30	72	64,72	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASILAMBENA	7301092003	LEMBANG MATENE	123	70	93	42	40	55	66,61	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASILAMBENA	7301092004	PULO MADU	106	57	89	37	32	31	55,43	TERTINGGAL
KEPULAUAN SELAYAR	PASILAMBENA	7301092005	KARUMPA	94	54	87	38	30	67	58,27	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASILAMBENA	7301092006	GARAUPA RAYA	119	67	91	46	37	71	67,87	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102001	BONTOBULAENG	155	54	124	54	43	63	77,64	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102002	BONTOBARU	147	78	105	48	44	68	77,17	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102003	BONTOMALLING	127	64	90	46	32	63	66,46	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102004	LEMBANG BAJI	104	62	111	56	32	68	68,19	BERKEMBANG
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102005	BONTOJATI	133	61	114	62	35	61	73,39	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102006	UJUNG	148	62	122	60	44	64	78,74	MAJU
KEPULAUAN SELAYAR	BUKI	7301112001	BUKI	153	75	137	78	48	76	89,29	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BUKI	7301112002	LALANGBATA	164	75	148	62	48	64	88,35	MANDIRI

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKASEBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SKOR	STATUS INDEKS DESA 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(5+6+7+8+9+10)/635$	12
KEPULAUAN SELAYAR	BUKI	7301112003	BALANG BUTUNG	148	83	137	82	49	61	88,19	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BUKI	7301112004	KOHALA	142	75	126	74	46	58	82,05	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BUKI	7301112005	BONTOLEMPANGAN	151	84	160	86	48	72	94,65	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BUKI	7301112006	MEKAR INDAH	146	76	77	150	67	49	86,77	MANDIRI
KEPULAUAN SELAYAR	BUKI	7301112007	BUKI TIMUR	146	76	144	74	46	77	88,66	MANDIRI

BENTENG, 20 Februari 2026  
KEPALA DINAS,



ZULFIKRI, S.STP  
Pangkat : Pembina TK.I  
NIP. 19790818 199711 1 002